

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Didorong Kualifikasi Profesionalitas Pembuat Laporan Keuangan
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Republika/ Hal. 14
Edisi	: Kamis, 3 Mei 2018



● Ketua BPK RI Prof Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan orasi ilmiah di Aula Universitas Padjadjaran, Kota Bandung.

Didorong Kualifikasi Profesionalitas Pembuat Laporan Keuangan

BANDUNG — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Profesor Moermahadi Soerja Djanegara menilai tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Akibatnya, masyarakat mudah terbujuk oleh beragam produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan risikonya.

Sebelum melakukan keputusan ekonomi atau berinvestasi, menurut Moermahadi, masyarakat sering kali tidak melakukan verifikasi terhadap kondisi dan kredibilitas perusahaan. Padahal, verifikasi perusahaan ini dinilai penting. "Kredibilitas lembaga keuangan sebaiknya menjadi bahan pertimbangan dan jangan cepat tergiur oleh iming-iming harga murah dan bunga tinggi. Karena, di ilmu manajemen keuangan berlaku istilah *high risk, high return*. Dengan kata lain, imbal hasil yang tinggi selalu ditemani oleh risiko yang tinggi," kata Moermahadi, dalam rilis Universitas Padjadjaran (Unpad) yang diterima *Republika*.

Moermahadi menyampaikan persoalan tersebut dalam orasi ilmiahnya yang bertajuk "Urgensi Profesionalisme Pengelolaan Keuangan melalui Kewajiban Pelaporan Keuangan" di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Kota Bandung, pekan lalu. Dalam paparannya, ia menjelaskan, verifikasi kondisi dan kredibilitas perusahaan ini antara lain dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan. "Kurang literasi keuangan dan pemanfaatan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu penyebab masyarakat mudah terbujuk untuk berinvestasi di perusahaan atau entitas tanpa melihat dan menganalisis kondisi keuangannya," kata guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad yang diangkat sebagai dosen tidak tetap itu.

Selain mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat, Moermahadi juga menyarankan perlunya aturan dan sanksi yang tegas terkait kewajiban perusahaan menyelenggarakan laporan keuangan usahanya dengan baik. Untuk itu, kata dia, dibutuhkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan dari berbagai tingkatan untuk menyusun laporan keuangan. Menurut dia, dibutuhkan pula pengaturan terkait kualifikasi profesionalitas bagi para pembuat laporan keuangan. Mengingat pentingnya laporan keuangan ini, kata dia, maka sudah seharusnya pembuatnya pun memiliki kualifikasi tertentu yang dibutuhkan.

Berdasarkan kajian akademis Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Moermahadi menyebut, belum ada negara yang menerapkan kompetensi minimum bagi pihak manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaporan keuangan. Ia menilai, kewajiban tersebut sebenarnya sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. "Kepada para akademisi, organisasi profesi, dan juga pemerintah, marilah kita bekerja sama untuk menyusun dan merumuskan program sertifikasi ini agar pembuatan laporan keuangan diberikan kepada orang-orang yang tepat dengan keahlian yang tepat," kata Moermahadi. ■ ed: irfan fitrat